

Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Pada Kinerja Arus Kas Operasi UMKM Pangan: Studi Kasus Komparatif

Wirdi Rotibil Alliyah¹, Rizky Ridwan²

^{1,2}Universitas Cipasung Tasikmalaya, Indonesia

E-mail: wirdirotibilalliyah@gmail.com¹, rizkyridwan@uncip.ac.id².

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 09 Agustus 2026

Accepted: 04 September 2026

Keywords: Program MBG, Arus Kas Operasi, Likuiditas UMKM, Cash Buffer, Timing Gap

Abstract: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang berpotensi membuka peluang pasar signifikan bagi UMKM pangan, namun di sisi lain memunculkan tantangan likuiditas akibat mekanisme pembayaran termin. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi Program MBG terhadap kinerja arus kas operasi UMKM IRM selaku UMKM mitra penyedia bahan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif before-after selama 8 bulan (Mei-Desember 2025), menggunakan analisis Arus Kas Operasi metode langsung (direct method), Days Sales Outstanding (DSO), Operating Cash Flow Ratio, serta koefisien variasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG meningkatkan AKO sebesar 46%, namun bersifat substitutif karena diimbangi kenaikan pengeluaran operasional sebesar 36,13%. Tekanan likuiditas harian ditemukan bersifat struktural, tercermin dari DSO rata-rata 7,5 hari dan Operating Cash Flow Ratio rata-rata 0,38, jauh di bawah standar sehat 1,00. Tekanan ini dikelola melalui mekanisme cash buffer berlapis (owner-as-buffer). Di sisi lain, stabilitas arus kas secara relatif membaik, ditandai dengan penurunan koefisien variasi dari 8,51% menjadi 7,01%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program MBG memberikan dampak positif pada volume AKO namun belum sepenuhnya disertai mekanisme pembayaran yang ramah terhadap karakteristik operasional UMKM pangan.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis nasional yang digulirkan pemerintah sebagai upaya fundamental dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menuju visi Generasi Emas Indonesia 2045 (KEMENKO PMK, 2025). Komitmen pemerintah terhadap program ini diperkuat secara hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), yang menandai komitmen

pemerintah melalui pembentukan lembaga khusus di bawah tanggung jawab Presiden untuk melaksanakan fungsi pemenuhan gizi secara terencana (Peraturan BPK, 2024). Dalam dimensi ekonomi, program ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dengan mengharuskan pengadaan bahan pangan sebesar 85% bersumber dari produk lokal dan UMKM, sehingga membuka peluang pasar yang signifikan bagi pelaku usaha di tingkat daerah (CELIOS, 2025).

Di balik peluang tersebut, keterlibatan UMKM pangan dalam rantai pasok Program MBG tidak serta berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, penyelesaian tagihan kepada pemasok hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses verifikasi dokumen pendukung oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpenuhi (Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025., 2025). Mekanisme ini secara struktural menciptakan *timing gap* antara pengeluaran tunai harian yang harus dipenuhi pemasok dengan penerimaan pembayaran yang bersifat periodik, sehingga UMKM harus menanggung beban piutang usaha yang besar di tengah keterbatasan modal kerja (Juniaty, 2025). Kondisi ini diperparah oleh karakteristik operasional UMKM pangan yang mengharuskan pengadaan bahan baku secara tunai setiap hari demi menjaga kelangsungan produksi, sementara penerimaan kas baru tersedia di akhir siklus mingguan. Fenomena *cash flow mismatch* semacam ini merupakan salah satu penyebab utama tekanan likuiditas pada UMKM, sebagaimana ditegaskan oleh Przychocka, Sikorski and Milewski, (2024) bahwa UMKM sering kali tidak mengalami kekurangan pendapatan secara total, melainkan menghadapi jeda waktu antara pengeluaran dan penerimaan yang menciptakan tekanan modal kerja jangka pendek. Jika tidak dikelola dengan tepat, kondisi ini dapat mengancam stabilitas keuangan usaha meskipun secara akuntansi mencatatkan laba.

Penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan UMKM umumnya masih berfokus pada faktor internal seperti efektivitas manajemen kas secara umum dalam meningkatkan kinerja keuangan (Riyanti et al., 2024), serta dampak kebijakan publik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih banyak menyoroti indikator laba bersih dan omzet tanpa menyentuh aspek arus kas operasi secara spesifik (Damanik & Tarigan, 2024). Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang menggunakan desain perbandingan dua periode (before-after) untuk mengkaji bagaimana skema pembayaran kontraktual dalam kebijakan nasional seperti MBG memengaruhi volatilitas likuiditas dan kinerja arus kas operasi pada sektor UMKM pangan. Kesenjangan penelitian ini menjadi justifikasi utama atas urgensi kajian empiris yang lebih terfokus pada dinamika arus kas di level operasional harian UMKM mitra program pemerintah.

Urgensi kajian tersebut semakin diperkuat oleh perkembangan kebijakan fiskal terbaru yang justru membuka ketidakpastian baru bagi keberlanjutan Program MBG itu sendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 mengumumkan pagu anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, dan berpotensi dipangkas lebih lanjut (Antaranews, 2026; CNN Indonesia, 2026). Pemangkasan ini berpotensi mengurangi jumlah SPPG yang beroperasi serta volume pengadaan bahan pangan dari UMKM mitra, sehingga celah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya bukan lagi sekadar kesenjangan akademis, melainkan kebutuhan mendesak untuk dijawab sebelum dampak kebijakan tersebut benar-benar dirasakan di tingkat operasional UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak

implementasi Program MBG terhadap kinerja arus kas operasi UMKM IRM selaku mitra penyedia bahan pangan di Kabupaten Tasikmalaya melalui tiga dimensi analisis: (1) perubahan volume Arus Kas Operasi (AKO) sebelum dan sesudah implementasi program, (2) kondisi likuiditas operasional yang diukur melalui Days Sales Outstanding (DSO) dan *Operating Cash Flow Ratio*, serta (3) stabilitas arus kas yang diukur melalui Koefisien Variasi (CV). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris bagi pemangku kebijakan mengenai kesesuaian mekanisme pembayaran program dengan karakteristik operasional UMKM pangan, sekaligus menjadi panduan praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola arus kas di tengah implementasi program pengadaan pemerintah berskala nasional.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berpijak pada *Public Policy Impact Theory* Dye, (1972) yang memandang kebijakan publik sebagai intervensi terencana yang secara langsung mengubah kondisi ekonomi pihak yang menjadi sasarannya. Dalam konteks ini, Program MBG bukan hanya membuka peluang pasar bagi UMKM pangan, tetapi juga merekonstruksi struktur arus kas operasional mereka melalui mekanisme pembayaran yang melekat pada program, sehingga dampaknya perlu dikaji secara empiris pada level operasional usaha.

Arus Kas Operasi (AKO) didefinisikan sebagai aliran kas masuk dan keluar yang bersumber dari aktivitas utama entitas dalam menghasilkan pendapatan, mencakup penerimaan dari pelanggan serta pembayaran kepada pemasok dan karyawan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Penelitian ini mengukur AKO menggunakan metode langsung (*direct method*) sesuai PSAK 207 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024) melalui perhitungan persentase perubahan AKO antara periode sebelum dan sesudah implementasi program MBG, di mana seluruh arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional dikelompokkan secara riil untuk mengidentifikasi sumber utama kas harian perusahaan.

Analisis likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan entitas mengonversi aset menjadi kas secara cepat guna memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat waktu, hal ini dilakukan untuk menguji kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek di tengah jeda pembayaran struktural. Penelitian ini mengukur likuiditas melalui dua indikator: *Days Sales Outstanding* (DSO) untuk mengukur durasi rata-rata konversi piutang menjadi kas (Brigham, Eugene F. & Houston, 2019), serta *Operating Cash Flow Ratio* untuk mengukur kemampuan arus kas operasional dalam membayar kewajiban jangka pendek (Mills & Yamamura, 1998). Rasio ini dinilai lebih representatif dibandingkan rasio likuiditas konvensional karena berbasis arus kas aktual, bukan hanya saldo akun, sehingga menjadi ukuran yang lebih konservatif atas kemampuan entitas membiayai pengeluaran operasional dari kas (Harahap, 2020, dalam Widyadana & Seputro, 2025).

Analisis stabilitas Arus Kas didefinisikan sebagai tingkat konsistensi aliran kas masuk dan keluar entitas dalam periode tertentu yang mencerminkan kemampuan meminimalkan risiko kegagalan bayar akibat fluktuasi penerimaan (Lestiningsih et al., 2021). Penelitian ini mengukur stabilitas menggunakan Standar Deviasi sebagai ukuran penyebaran absolut dan Koefisien Variasi (CV) sebagai ukuran penyebaran relatif yang bersifat *scale invariant*, sehingga perbandingan volatilitas antara dua periode dengan skala AKO berbeda tetap valid (Santos & Dias, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, (2019)

metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan variabel secara mandiri tanpa mencari hubungan kausalitas antar variabel. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara objektif kondisi Arus Kas Operasi (AKO) UMKM IRM akibat implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus komparatif yang membandingkan tren keuangan periode sebelum dan sesudah entitas menjadi mitra program pemerintah. Data yang dianalisis mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha dan observasi lapangan terkait mekanisme distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data sekunder bersumber dari buku kas harian, catatan piutang, serta dokumen penagihan termin periode 2025. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni UMKM IRM selaku vendor strategis di Kabupaten Tasikmalaya yang melayani 6 unit SPPG.

Periode pengamatan ditetapkan selama 8 bulan, terbagi menjadi 4 bulan sebelum MBG (Mei-Agustus 2025) dan 4 bulan sesudah MBG (September-Desember 2025), mengingat program baru resmi memengaruhi operasional perusahaan pada September 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk menangkap dampak struktural kebijakan terhadap arus kas operasional secara akurat sekaligus menghindari bias musiman (*seasonal effect*) yang dapat mengaburkan kondisi likuiditas riil perusahaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang sistematis dan saling berkesinambungan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Arus Kas (AKO) Menggunakan metode langsung (*direct method*) sesuai PSAK 207 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024) dengan rumus:

$$AKO = \text{Total Penerimaan Kas Operasional} - \text{Total Pengeluaran Kas Operasional}$$

AKO bernilai positif mengindikasikan perusahaan mampu membiayai operasionalnya secara mandiri, AKO negatif mengindikasikan ketergantungan pada pendanaan eksternal (Kieso et al., 2019).

2. Analisis Likuiditas
Day Sales Outstanding (DSO)

$$DSO = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Total Penjualan Kredit}} \times \text{Jumlah Hari dalam Periode}$$

Standar penilaian mengacu pada prinsip umum manajemen piutang Kasmir, (2019) menyebutkan bahwa semakin rendah nilai DSO maka semakin cepat perusahaan mengonversi piutang menjadi kas sehingga semakin baik kondisi likuiditas operasionalnya. Hingga saat ini belum terdapat standar baku DSO yang ditetapkan secara resmi bagi UMKM oleh Bank Indonesia, OJK, maupun Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga penilaian dilakukan secara deskriptif komparatif.

Operating Cash Flow Ratio (OCF Ratio)

Operating Cash Flow Ratio: mengukur kecukupan kas dari aktivitas operasi dalam membiayai kewajiban jangka pendek suatu entitas (Mills & Yamamura, 1998).

$$\text{Operating Cash Flow ratio} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Standar penilaian *Operating Cash Flow Ratio* menetapkan ambang $\geq 1,0$ sebagai kondisi sehat, yang mengindikasikan bahwa kas dari aktivitas operasi mampu menutupi seluruh kebutuhan kas jangka pendek. Nilai rasio di bawah 1,0 mengindikasikan bahwa kas dari aktivitas operasi belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan tersebut. Standar ini tetap digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, mengingat belum terdapat standar baku khusus untuk sektor UMKM berbasis kas yang ditetapkan secara resmi oleh otoritas terkait.

3. Analisis Stabilitas Arus Kas Standar Deviasi (SD)

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{[\sum(X_i - \bar{X})^2 / n]}$$

Koefisien Variasi (CV)

$$CV = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata - Rata AKO}} \times 100\%$$

CV dipilih sebagai ukuran utama stabilitas karena bersifat relatif dan tidak terpengaruh oleh perbedaan skala nominal antara dua periode, sehingga lebih andal digunakan untuk membandingkan variabilitas AKO pada kondisi bisnis yang berbeda volume (Santos & Dias, 2021). Standar penilaian dalam literatur manajemen keuangan UMKM menetapkan bahwa nilai CV di bawah 10% mengindikasikan fluktuasi yang sangat rendah dan terkendali, sedangkan nilai CV yang semakin mendekati nol mencerminkan pola AKO yang semakin stabil dan konsisten antarbulan (Przychocka, Sikorski and Milewski, 2024). Dengan demikian, stabilitas relatif AKO dinyatakan membaik apabila nilai CV pada periode sesudah MBG lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, karena hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi AKO semakin proporsional terhadap rata-ratanya meskipun skala bisnis bertumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dan pembahasan analisis kinerja arus kas operasi UMKM IRM sebelum dan sesudah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode Mei-Desember 2025:

1. Hasil Analisis Arus Kas Operasi Sebelum dan Sesudah Implementasi Program MBG sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Komparatif Arus Kas Operasi Sebelum dan Sesudah Implementasi Program MBG (Data Per Bulan)

No	Bulan	Periode	Total Pendapatan (Rp)	Total Pengeluaran(Rp)	AKO Bersih (Rp)
1.	Mei 2025	Sebelum MBG	729.660.845,60	542.620.030,00	187.040.816
2.	Juni 2025	Sebelum MBG	826.509.408,80	606.336.190,00	220.173.219
3.	Juli 2025	Sebelum MBG	841.512.781,60	616.206.830,00	225.305.952
4.	Agustus 2025	Sebelum MBG	838.311.160,00	614.100.500,00	224.210.660
Total & Rata-rata Sebelum MBG			3.235.994.196	2.379.263.550	856.730.646 Rata-rata: 214.182.662

5.	September 2025	Sesudah MBG	1.139.736.078,60	824.082.900,00	315.653.179
6.	Oktober 2025	Sesudah MBG	1.119.039.736,56	808.416.840,00	310.622.897
7.	November 2025	Sesudah MBG	1.192.575.488,24	853.420.360,00	339.155.128
8.	Desember 2025	Sesudah MBG	1.054.872.507,54	769.146.810,00	285.725.698
Total & Rata-rata Sesudah MBG			4.506.223.810,94	3.255.066.910	1.251.156.902 Rata-rata: 312.789.225,5
Perubahan (%)			+39,25%	+36,13%	46%

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis, implementasi Program MBG memberikan dampak positif terhadap kinerja AKO UMKM IRM. Secara keseluruhan, total AKO meningkat dari Rp856.730.646 menjadi Rp1.251.156.902,00, atau tumbuh sebesar 46%, dengan rata-rata AKO bulanan naik dari Rp214.182.662 menjadi Rp312.789.225. Peningkatan ini utamanya didorong oleh masuknya sumber penerimaan baru dari enam dapur SPPG yang memberikan kepastian pasar bagi perusahaan, sejalan dengan Public Policy Impact Theory Dye, (1972) yang menegaskan bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan baik berpotensi mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi pelaku usaha di lapisan bawah.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan AKO tersebut bersifat substitutif: penerimaan periode sesudah MBG berasal dari dua sumber sekaligus, yaitu penjualan ke enam dapur SPPG dan penjualan di pasar tradisional, di mana kontribusi SPPG justru mengisi celah yang ditinggalkan oleh penurunan pasar tradisional yang cukup signifikan. Penjualan pasar tradisional yang sebelumnya berada di kisaran Rp729-Rp841 juta per bulan, turun tajam menjadi Rp285.798.756,56 pada Oktober 2025 bulan dengan nilai terendah sepanjang periode pengamatan. Fenomena ini terjadi karena pedagang-pedagang kecil penjual makanan di sekitar sekolah mulai kehilangan pelanggan sejak siswa mendapatkan makanan dari Program MBG. Kenaikan pengeluaran sebesar 36,13% turut mempersempit margin pertumbuhan AKO, yang dilatarbelakangi oleh kenaikan harga beli ayam hidup akibat lonjakan permintaan SPPG serta peningkatan beban operasional distribusi ke enam titik dapur. Kondisi ini sejalan dengan temuan dengan Khaled et al., (2025) bahwa penerapan manajemen arus kas yang terstruktur berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM mengindikasikan bahwa pertumbuhan AKO IRM yang terjadi secara nominal masih rentan, mengingat pencatatan arus kas operasional perusahaan belum dilakukan secara formal dan sistematis.

Pola menarik tampak pada Desember 2025. AKO pada bulan tersebut mencatatkan nilai terendah sepanjang periode sesudah MBG akibat berkurangnya hari operasional efektif SPPG karena libur akhir tahun sekolah dan peralihan ke paket kering. Penjualan pasar tradisional pada bulan yang sama justru mencatatkan nilai tertinggi sepanjang periode sesudah MBG, yakni Rp544.096.747,54, melampaui penjualan ke SPPG yang hanya sebesar Rp510.775.760,00. Kedua saluran penjualan perusahaan terbukti bersifat saling melengkapi: ketika volume SPPG melemah akibat libur sekolah, penjualan pasar tradisional mengisi celah tersebut secara alami, sehingga stabilitas AKO secara keseluruhan tetap terjaga. Temuan ini sejalan dengan Riyanti *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas arus kas dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM

sangat bergantung pada konsistensi penerimaan dari sumber utama pendapatan. Dengan demikian, gambaran deskriptif AKO sesudah MBG menunjukkan pertumbuhan yang secara absolut positif namun bersifat substitutif, di mana peningkatan nominal tidak sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan kapasitas finansial perusahaan secara riil, meski ketahanan operasional tetap terjaga melalui diversifikasi saluran penjualan yang saling menopang.

2. Hasil Analisis Days Sales Outstanding (DSO) dan *Operating Cash Flow Ratio* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Days Sales Outstanding (DSO)

Bulan	Piutang Usaha	Penjualan Kredit	Hari Operasional	Hasil DSO
September 2025	176.543.265	706.173.060	30 hari	7,5 Hari
Oktober 2025	208.310.245	833.240.980	30 hari	7,5 Hari
November 2025	202.559.860	810.239.440	30 hari	7,5 Hari
Desember 2025	170.258.587	510.775.760	21 hari	7,0 Hari
Rata-rata	189.417.990	715.107.310		7,5 Hari

Sumber: Data primer diolah, 2026 *) Desember menggunakan 21 hari efektif karena libur akhir tahun sekolah

Hasil perhitungan pada Tabel 2 menunjukkan DSO UMKM IRM konsisten di angka 7,5 hari pada September hingga November 2025. Angka ini mencerminkan bahwa setiap rupiah yang dikirimkan dalam bentuk ayam ke dapur SPPG rata-rata baru berubah menjadi kas setelah tujuh setengah hari persis satu siklus minggu penuh. Pola ini terbentuk karena mekanisme pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan BGN Nomor 244 Tahun 2025 (Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025., 2025). Regulasi tersebut mewajibkan setiap dapur SPPG untuk menyelesaikan proses verifikasi dan pelaporan pengiriman kepada BGN terlebih dahulu sebelum dana dapat dicairkan, sehingga pembayaran kepada pemasok terkadang baru dapat dilakukan setelah proses administrasi tersebut selesai di akhir minggu, umumnya pada hari Jumat atau paling lambat Sabtu. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik menyampaikan bahwa rata-rata distribusi ayam hanya berlangsung lima hari per minggu karena hari Sabtu sering digantikan paket kering oleh dapur SPPG yang sekolahnya menerapkan *full day school*. Kondisi ini secara struktural menciptakan *timing gap* yang berulang setiap minggu. Przychocka, Sikorski and Milewski, (2024) menegaskan bahwa UMKM sering kali tidak mengalami kekurangan pendapatan secara total, tetapi justru menghadapi jeda waktu antara pengeluaran dan penerimaan yang menciptakan tekanan modal kerja jangka pendek.

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Operating Cash Flow Ratio*

Bulan	AKO Bersih	Pengeluaran	<i>Operating Cash Flow Ratio</i>
September 2025	315.653.179	824.082.900	0,38
Oktober 2025	310.622.897	808.416.840	0,38
November 2025	339.155.129	853.420.360	0,40
Desember 2025	285.725.698	769.146.810	0,37
Rata-rata	312.789.225	813.766.727	0,38

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel.3 Tekanan *timing gap* ini semakin tergambar jelas melalui *Operating Cash Flow Ratio* yang berada di kisaran 0,37 hingga 0,40 sepanjang empat bulan, dengan rata-rata 0,38. Nilai ini berarti dari setiap Rp1,00 kewajiban pengeluaran operasional, hanya tersedia Rp0,38 kas bersih dari hasil operasional. Yang perlu dipahami adalah bahwa tekanan ini bukan terjadi di akhir bulan, melainkan berulang setiap hari setelah pembayaran mingguan diterima hingga pembayaran minggu berikutnya tiba. Kondisi ini merupakan konsekuensi struktural dari asimetri pola pembayaran Program MBG: pembelian ayam hidup harus dipenuhi tunai setiap hari, sementara penerimaan dari SPPG baru masuk setiap akhir minggu setelah proses verifikasi selesai. Riyanti *et al.*, (2024) menyatakan bahwa AKO yang positif belum tentu mencerminkan likuiditas yang aman apabila tidak didukung oleh keseimbangan antara penerimaan tunai harian dan kewajiban yang bersifat harian.

Hasil wawancara mendalam dengan pemilik mengungkapkan bahwa tekanan tersebut dikelola melalui mekanisme *cash buffer* berlapis yang bekerja secara hierarkis. Lapis pertama adalah pencairan piutang MBG mingguan sebagai fondasi utama yang menanggung sebagian besar net gap harian. Lapis kedua adalah penerimaan tunai dari penjualan pasar tradisional yang langsung cair pada hari yang sama karena bersifat *cash and carry*, yang secara konsisten menutup sebagian kebutuhan kas harian. Lapis ketiga adalah dana pribadi pemilik yang bersifat situasional aktif hanya apabila pada hari tertentu kombinasi saldo kas dan penerimaan pasar tidak mencukupi kebutuhan pembelian, khususnya di penghujung siklus atau ketika harga ayam melonjak. Dalam kondisi normal, kombinasi lapis pertama dan kedua sudah mampu menanggung kebutuhan operasional hingga pencairan berikutnya tiba, sehingga lapis ketiga jarang diperlukan. Maharani and Rita, (2020) menyebut pola ini sebagai *owner-as-buffer*, dan Ridwan & Jaenudin, (2024) menambahkan bahwa UMKM dalam rantai pasok institusional sering kali bertahan justru karena kemampuan pemilik mengoptimalkan berbagai sumber kas secara bergantian sesuai kebutuhan harian.

3. Hasil Analisis Standar Deviasi dan Koefisien Variasi (CV) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Arus Kas Operasi

Indikator Statistik	Sebelum MBG (Mei-Agustus 2025)	Sesudah MBG (September-Desember 2025)
Rata-Rata AKO (Rp)	214.182.662	312.789.225
Standar Deviasi (Rp)	18.228.685	21.912.634
Coefficient of Variation (CV)	8,51%	7,01%
Perubahan Rata-Rata AKO	Naik Rp98.606.563,5 (+46%)	
Perubahan CV	Turun 1,51 poin persentase stabilitas relatif membaik	

Sumber: Data keuangan, diolah peneliti (2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa Standar Deviasi AKO meningkat secara nominal dari Rp18.228.685 menjadi Rp21.912.634 setelah implementasi Program MBG. Peningkatan ini perlu dipahami sebagai konsekuensi logis dari ekspansi skala bisnis yang hampir dua kali lipat ketika volume transaksi membesar, sebaran nominal AKO antarbulan secara wajar turut melebar, bukan sebagai indikator memburuknya stabilitas. Apabila diukur melalui CV, hasilnya justru sebaliknya: CV turun dari 8,51% menjadi 7,01%, atau membaik sebesar 1,51 poin persentase.

Nilai CV di bawah 10% pada kedua periode mengindikasikan bahwa fluktuasi AKO UMKM IRM berada dalam kategori sangat rendah, dan penurunan CV pascaimplementasi MBG mempertegas bahwa stabilitas relatif semakin menguat (Przychocka, Sikorski and Milewski, 2024). Penurunan ini dapat dijelaskan melalui karakteristik Program MBG yang mewajibkan pasokan rutin ke enam dapur SPPG setiap hari dalam volume yang relatif terjadwal, sehingga menciptakan pola penerimaan kas yang lebih teratur dan dapat diprediksi dibandingkan penjualan pasar tradisional yang sangat bergantung pada fluktuasi permintaan harian.

Temuan kuantitatif tersebut dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan pemilik UMKM IRM. Pemilik mengungkapkan bahwa setelah bergabung dengan Program MBG terdapat perasaan lebih tenang karena selalu ada pesanan yang datang dari dapur setiap harinya, sehingga perencanaan pembelian ayam hidup menjadi lebih mudah dan terukur. Meski demikian, pemilik juga mengakui bahwa pendapatan tetap berfluktuasi dari bulan ke bulan karena volume pesanan tiap dapur tidak selalu seragam, dan terdapat periode tertentu seperti Desember yang aktivitasnya berkurang akibat libur sekolah. Kondisi ini konsisten dengan data CV yang membaik namun tidak mencapai nol: stabilitas meningkat, namun fluktuasi tetap ada dalam batas yang wajar. Lestingsih *et al.*, (2021) menyatakan bahwa likuiditas yang stabil memungkinkan UMKM menjalankan operasional sehari-hari, mengatasi tantangan finansial, dan memanfaatkan peluang pertumbuhan secara berkelanjutan dan penurunan CV ini mencerminkan pergerakan nyata ke arah kondisi tersebut.

Perlu dicatat bahwa stabilitas AKO bulanan yang tercermin dalam CV tidak serta-merta berarti perusahaan bebas dari tekanan keuangan di semua dimensi waktu. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, tekanan likuiditas harian tetap ada dan berulang setiap minggu akibat *timing gap* pembayaran SPPG. Kondisi ini sejalan dengan konsep *trade receivables gap* dalam literatur manajemen kas UMKM, di mana keterlambatan penerimaan pembayaran dari pembeli institusional dapat memunculkan tekanan likuiditas jangka pendek meskipun kinerja bulanan tetap terjaga (Lestingsih *et al.*, 2021). Dengan demikian, angka CV yang membaik mencerminkan stabilitas di level bulanan, sementara di level harian tekanan tetap dirasakan dan dikelola melalui mekanisme *cash buffer* berlapis sebagaimana telah diuraikan. Kedua dimensi ini harus dibaca secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dampak implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap kinerja arus kas operasi UMKM IRM melalui tiga dimensi analisis, yaitu volume AKO, kondisi likuiditas, dan stabilitas arus kas. Secara keseluruhan, Program MBG terbukti memberikan dampak positif terhadap volume AKO namun sekaligus menghadirkan kompleksitas likuiditas yang tidak terlihat dari angka bulanan semata.

Pertama, Program MBG terbukti meningkatkan AKO CV Ina Rahayu Mandiri sebesar 46% dari Rp856.730.646 menjadi Rp1.251.156.902. Namun peningkatan ini bersifat substitutif, karena kenaikan penerimaan dari dapur SPPG diimbangi oleh penurunan penjualan pasar tradisional akibat berkurangnya pedagang kecil di sekitar sekolah, ditambah kenaikan pengeluaran operasional sebesar 36,13%, sehingga pertumbuhan nominal AKO tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kapasitas finansial riil perusahaan.

Kedua, kondisi likuiditas menunjukkan tekanan struktural yang berulang, hal ini tercermin dari DSO rata-rata 7,5 hari dan *Operating Cash Flow Ratio* rata-rata 0,38 yang berada di bawah standar ideal $\geq 1,0$. Tekanan ini berulang setiap minggu akibat *timing gap* antara

kewajiban tunai harian pembelian ayam dan penerimaan termin mingguan dari SPPG, namun berhasil dikelola melalui mekanisme *cash buffer* berlapis: pencairan MBG mingguan sebagai fondasi utama, penerimaan tunai pasar tradisional sebagai penyangga harian, dan dana pribadi pemilik sebagai katup pengaman situasional yang aktif hanya pada kondisi marginal.

Ketiga, Program MBG terbukti efektif meningkatkan stabilitas AKO secara relatif dengan penurunan CV dari 8,51% menjadi 7,01%, mencerminkan pola penerimaan kas yang lebih teratur akibat kepastian pasokan ke enam dapur SPPG. Namun stabilitas di level bulanan ini tidak meniadakan tekanan harian yang tetap berulang setiap minggu akibat *cash flow mismatch*.

Temuan ini menegaskan bahwa Program MBG berhasil memperluas volume dan stabilitas AKO UMKM mitra, namun mekanisme pembayaran termin yang berlaku belum selaras dengan ritme operasional harian UMKM pangan. Keberlanjutan rantai pasok program ini secara jangka panjang mensyaratkan reformasi mekanisme pencairan dana SPPG yang lebih responsif terhadap karakteristik modal kerja UMKM. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada tiga pihak: UMKM mitra, penyelenggara program, dan peneliti selanjutnya.

Bagi UMKM IRM, disarankan untuk mulai menyusun perencanaan arus kas mingguan secara formal dan secara bertahap menggantikan ketergantungan pada dana pribadi pemilik dengan cadangan modal kerja yang terstruktur melalui sumber pendanaan eksternal yang terstruktur.

Bagi Badan Gizi Nasional dan penyelenggara Program MBG, disarankan untuk mengevaluasi mekanisme pembayaran termin mingguan dengan mempertimbangkan percepatan siklus pembayaran atau penyediaan fasilitas *advance payment* bagi UMKM pemasok bahan pangan segar, mengingat keberlanjutan rantai pasok UMKM dalam program pemerintah sangat bergantung pada kesesuaian antara mekanisme pembayaran dan karakteristik operasional mitra.

Rekomendasi ini semakin mendesak untuk ditindaklanjuti mengingat perkembangan kebijakan fiskal terkini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 mengonfirmasi pagu anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dengan kemungkinan efisiensi lebih lanjut yang masih dihitung (Antaranews, 2026; CNN Indonesia, 2026). Bagi UMKM mitra seperti IRM, pemangkasan ini bukan sekadar isu fiskal makro melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan arus kas operasional. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan AKO UMKM IRM bersifat substitutif, artinya penjualan pasar tradisional sudah menyusut sejak program berjalan. Jika volume pengadaan SPPG berkurang akibat efisiensi anggaran, UMKM mitra tidak memiliki sumber pendapatan pengganti yang cukup kuat. Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi mekanisme pembayaran program kepada UMKM mitra bukan lagi sekadar rekomendasi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi keberlangsungan usaha UMKM pangan di tengah ketidakpastian kebijakan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan beberapa UMKM mitra MBG dari sektor bahan pangan yang berbeda serta menggunakan pendekatan *mixed method* untuk mengukur dampak jangka panjang program terhadap keberlanjutan usaha UMKM mitra secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Antarnews. (2026). *Pemerintah pangkas anggaran MBG jadi Rp268 triliun pada 2026*. <https://www.antarnews.com/berita/5573624/pemerintah-pangkas-anggaran-mbg-jadi-rp268-triliun-pada-2026>
- Brigham, Eugene F. & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning (South-Western).
- CELIOS. (2025). Yang Lapar Siapa ? Yang Kenyang Siapa ? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis. *Center of Economic and Law Studies (Celios)*, 50.
- CNN Indonesia. (2026). *Prabowo Instruksikan Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 T*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260520093917-532-1360252/prabowo-instruksikan-anggaran-mbg-dipangkas-jadi-rp268-t>
- Damanik, Y. R., & Tarigan, V. (2024). Pengaruh Program KUR dan BLT terhadap Kinerja UMKM di Nagori Dolok Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.36985/7a2szz30>
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Eka Riyanti, Arfianty, A., & Damis, S. (2024). Analisis Efektifitas Arus Kas Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Moko Donuts Kota Parepare. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 311–322. <https://doi.org/10.31850/decision.v5i2.3276>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 207: Laporan Arus Kas*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Jaenudin, U. E., Ridwan, R., Lestari, D. F., Arifah, A. N., Abdurachman, A., & Akbar, T. (2024). *Peningkatan Literasi Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan UMKM*. 8(1), 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6195>
- Juniaty, F. (2025). *Makan Bergizi Gratis*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/makan-bergizi-gratis/?lang=id>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan ke 12 (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- KEMENKO PMK. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/program-makan-bergizi-gratis-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm-indonesia>
- Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025., 1 (2025).
- Khaled, J., Kamil, I., Prihanto, H., & Venni, R. (2025). Pengaruh Penerapan Manajemen Arus Kas Terhadap Kelangsungan Usaha UMKM di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 35–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jmb.v5i1.5397>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Lestiningsih, A. S., Ratiyah, R., Bahri, S., Salsabila, N., & Yuliyana, T. (2021). Pentingnya Mengelola Kestabilan Arus Kas Di Era New Normal Pada Asosiasi UMKN Naik Kelas Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v1i1.300>
- Maharani, D. S., & Rita, M. R. (2020). Literasi Keuangan Dan Pertumbuhan UMKM: Peran Mediasi Manajemen Kas. *Ekonomi & Bisnis*, 19(1), 11–20. <https://doi.org/10.32722/eb.v19i1.2729>

-
- Mills, J. R., & Yamamura, J. H. (1998). The Power of Cash Flow Ratios. *Journal of Accountancy*, 186(4), 53–61. <https://www.journalofaccountancy.com/issues/1998/oct/mills/>
- Peraturan BPK. (2024). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. PERPRESNO83. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- Przychocka, I., Sikorski, M., & Milewski, L. (2024). Cash Flow Management in Small and Medium Enterprises in Times of Economic Uncertainty. *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL*, XXVII(Issue 2), 155–162. <https://doi.org/10.35808/ersj/3376>
- Santos, C., & Dias, C. (2021). Note on the coefficient of variation properties. *Brazilian Electronic Journal of Mathematics*, 2(4), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.14393/BEJOM-v2-n4-2021-58062>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widyadana, A. S., & Seputro, D. N. D. (2025). Analisis Arus Kas Operasional dan Likuiditas Jangka Pendek (Studi Kasus: Perusahaan Ritel Mainan di Surabaya). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1441–1450. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i3.1521>